Perbedaan Pandangan Terhadap Kekuatan Eksekutorial Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Kesepakatan
Perdamaian Dalam Putusan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjar Nomor : 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr)
Ravilka Yustitia Ismail, Dr. Hartini, S.H.,M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional,* Cetakan ke dua, Jakarta, PT. Kencana, 2011;

Arief, M.Isa, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Cetakan pertama, Jakarta, Intermasa, 1978;

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* Cetakan ke enam, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004;

Anshary. *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Cetakan pertama, Bandung, Mandar Maju, 2016;

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Cetakan ke dua, Jakarta, Garuda Pustaka Kartini, 1993;

_____, *Ruang Lingkup Permasalahan dan Eksekusi Bidang Perdata*, Cetakan ke tujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2014;

_____, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua,* Cetakan pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2017;

Hidayat, Maskur, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cetakan pertama, Jakarta, Kencana, 2016;

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedelapan*. Ceatakan ke tujuh, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2009;

Moleong, J.Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke tiga, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2002;

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Mataram, Mataram University Press, 2020;

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan pertama, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990;

Nugroho, Susanti Adi, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Pertama*, Cetakan pertama, Jakarta, Prenada Media, 2019;

Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*, Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2003;

Perbedaan Pandangan Terhadap Kekuatan Eksekutorial Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Kesepakatan
Perdamaian Dalam Putusan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjar Nomor : 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr)
Ravilka Yustitia Ismail, Dr. Hartini, S.H.,M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Cetakan ke tujuh, Bandung, Sumur Bandung, 1981;

Ramulyo, M Idris, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Cetakan ke dua, Jakarta, PT. Hill Co, 1999;

Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cetakan ke dua belas, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006;

Safudin, Endrik, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, Cetakan pertama, Malang, Intrans Publishing, 2018;

Santoso, Urip, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan ke enam, Jakarta, Prenada Media Group, 2019;

Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cetakan pertama, Banda Aceh, Yayasan PeNa, 2010;

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Cetakan ke tiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2012;

Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, Cetakan ke tiga, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993;

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*, Cetakan pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2019;

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Cetakan ke empat, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990;

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan pertama, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005;

_____, *Pengantar Penelitian Hukum,* Cetakan ke tiga, Jakarta, UI Press, 2014;

Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Cetakan pertama, Surabaya, Arkola Surabaya, 2003;

Sugeng, Bambang, dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Cetakan ke delapan, Jakarata, Kencana, 2011;

Sumardjono, Maria Sriwulani, *Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 14 Maret 1998;

Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, Cetakan ke dua, Jakarta, Transmedia Pustaka, 2008;

Perbedaan Pandangan Terhadap Kekuatan Eksekutorial Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Kesepakatan
Perdamaian Dalam Putusan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjar Nomor : 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr)
Ravilka Yustitia Ismail, Dr. Hartini, S.H.,M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan pendaftaran*, Cetakan pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2007;

_____, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Cetakan pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2011;

Tim Peneliti STPN 2014, *Asas-Asas Keagrariaan Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria, dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia*, Yogyakarta, STPN Press, 2015;

Usman, Rachmadi, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Cetakan pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2012;

Wahid, Muctar, *Memakna Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Cetakan pertama, Jakarta, Repulika, 2008;

Witanto, D.Y, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cetakan pertama, Bandung, Alfabeta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) (Staatsblad 1941-32 dan Staatsblad 1941-44);

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847-23);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159);

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perbedaan Pandangan Terhadap Kekuatan Eksekutorial Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Dalam Putusan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjar Nomor : 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr)
Ravilka Yustitia Ismail, Dr. Hartini, S.H.,M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);

Peraturan Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 569);

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perbedaan Pandangan Terhadap Kekuatan Eksekutorial Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Dalam Putusan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjar Nomor : 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr)
Ravilka Yustitia Ismail, Dr. Hartini, S.H.,M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, MA RI, Jakarta, 1994;

Fatwa Pengadilan Agama Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Nomor 2205/KPA.W10-A25/HK.05/IX/2023.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Banjar Nomor 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr, perihal Perkara Perceraian, 10 Desember 2020.

D. Artikel, Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi), Makalah, dan Jurnal

Abror, Nashihul, "Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syari'ah Dalam Mengadili Tindakan Jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *Jurnal Hukum Pidana Islam al-Jinâyah,* Vol. 6, No. 1, (Juni, 2020), 230-256, https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1;

Abdi, Israr, Yulia Mirwati, Azmi Fendri, "Kepastian Hukum Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Saat Menjadi Objek Sengketa di Pengadilan (Studi Kasus Pelaksanaan Eksekusi terhadap Objek Perkara Perdata No. 18/Pdt.G/2018/PN Kbr)", *Unes Law Review, Vol* 6, No. 3, (Maret 2024), 8261-8274, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3;

Arivan Amir, "Pengalihan Hak Penguasaan Tanah Menurut UUPA Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali", *Jurnal Repertorium*, Vol. 8 (Mei, 2019), 51-65, http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.311;

Benni, Beatrix, Kurniawarman, Anisa Rahman, "Pembuatan AKta Pembagian Hak Bersama Dalam Peralihan Tanah Karena Pewarisan Di Kota Bukittinggi" *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, (September, 2019), 65-75, http://doi.org/10.33760/jch.v5i1.175;

Estryana, Pasca Puja, "Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian", *Jurnal Locus Delicti*, Vol. 3 (Oktober, 2022), 142-156, https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD;

Gue, Rendi, "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Kasus Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Menurut Perspektif Hukum Perdata", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2023;

Gunanegara, "Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebagai Alas Hak Pengurusan Hak Atas Tanah", *Law Review*, Vol XXI, No. 3 (Maret, 2022); http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i3.4864;

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perbedaan Pandangan Terhadap Kekuatan Eksekutorial Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Dalam Putusan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjar Nomor : 722/Pdt.G/2020/PA.Bjr)
Ravilka Yustitia Ismail, Dr. Hartini, S.H.,M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Iftitah, Addien, "Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya", *Lex Privatum*, Vol. 2 (Agustus-Oktober, 2014), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6158;

Khairandy, Ridwan, "Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak", *Jurnal Hukum Edisi Khusus.* Vol. 18, (Oktober, 2011), 36-55, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/7232;

Kurniaji, Danar Fiscusia, "Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan", *Fiat Justitia* 10, No. 3, (Juli-September 2016), 413-586, http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat;

Ludviyanti, Anne, "Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Harta Gono-Gini)*", Tesis,* Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang, 2012;

Rahmadhani, Nurlaili Azizah, Edy Wahjuningati, "Problematika Peralihan Hak Atas Tanah Dasar Jual Beli Di Bawah Tangan Pada Sertifikat Hak Milik Nomor 11949 Di Kelurahan Sidosemo Kota Surabaya", *Jurnal Hukum Keadilan*, Vol. 13 (Juli, 2024), 56-69, https://doi.org/10.56943/judiciary.v13i1.239;

Walida, Rahmaisya, "Peningkatan Status Kesepakatan Perdamaian Yang Dihasilkan Dari Proses Mediasi Di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian Dihubungkan Dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan". *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2017.

E. Internet

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, "Beranda/Sekilas" https://www.atrbpn.go.id/menu/detail/204/sekilas, (diakses 15 April 2024);

Pengadilan Agama Ampana, "Mengenal Peradilan Agama" https://www.pa-ampana.go.id/arsip-artikel/1352-mengenal-peradilan-agama, (diakses 14 April 2024).